



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## SIARAN PERS

**Jakarta, 3 April 2018** - Menanggapi pemberitaan media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media daring (*online*) mengenai informasi yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada seluruh media massa atas pemberitaan tersebut sebagai upaya media dalam menjalankan fungsi kontrolnya bagi masyarakat.

Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak akurat, tidak sesuai fakta, dan berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman (*misleading*) di tengah masyarakat yang dapat merugikan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan maupun Ketua MK secara personal. Hal ini mengingat pada kenyataannya, Ketua MK Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. telah menyerahkan LHKPN kepada Direktorat PP LHKPN KPK RI pada 10 Maret 2017. Sebagai tambahan informasi, Wakil Ketua MK Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. juga telah menyerahkan LHKPN pada 6 Maret 2017 (tanda terima penyerahan formulir LHKPN terlampir). Informasi mengenai LHKPN seluruh hakim konstitusi dan pejabat di lingkungan Mahkamah Konstitusi dapat diakses di laman MK.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami meminta agar klarifikasi dan tanggapan ini dapat dimuat dan diberitakan kembali oleh media massa sebagai bentuk pertanggungjawaban media terhadap akurasi informasi dan standar etik jurnalistik sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

**Kepala Biro Humas dan Protokol,**

ttd

**Rubiyo**

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Humas MK

Telepon : 021-23529000

HP : 08121017130

Email : [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)

Laman : [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Lembar untuk Penyelenggara Negara



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIC INDONESIA  
Kotak Pos 575 Jakarta 10900

TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(MODEL KPK-B)

Atas Nama : Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi  
Bidang : Eksekutif / Legislatif / Yudikatif / BUMN-D  
Lembaga : Mahkamah Konstitusi  
Tingkat :  Pusat  Daerah  
Unit Kerja : .....

10/3/17  
DITERIMA DI  
Yang menerima BIREKTORAT PP LHKPN KRI  
Yang menyerahkan  
10 MAR 2017  
OLEH :  
PARAF : Eddy Swasono  
(Rmu Fakhri)  
JUMLAH :

Jabatan : Admin LHKPN  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....

\*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : Aswanto

Jabatan : Hakim Konstitusi

Bidang :

Lembaga : Mahkamah Konstitusi

Tahun Pelaporan : 2017

DITERIMA DI  
DIREKTORAT PP-LHKPN KPK RI

Yang menyetujui, Yang menyerahkan,

06 MAR 2017

( ) )

Jabatan: Jabatan:

Alamat : Alamat :

No. Telp. : No. Telp. :

\*) Tidak perlu ditandatangani apabila LHKPN disampaikan melalui email [elhkn@kpk.go.id](mailto:elhkn@kpk.go.id)